



BAB 9

Peran Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan

Siti Hajar Suryawati, Rizki Aprilian Wijaya, Achmad Zamroni, Hakim Miftakhul Huda, Sonny Koeshendrajana

A. Tantangan Pengelolaan Perikanan Rajungan

Rajungan merupakan komoditas industri perikanan unggul bernilai ekonomis tinggi di Indonesia dan telah diekspor ke berbagai negara, terutama Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa (Agustina et al., 2014; Hardjito, 2006; Ningrum et al., 2015). Dalam lima tahun terakhir, total ekspor rajungan (termasuk komoditas kepiting) meningkat menjadi 29 ribu ton pada tahun 2022 dari 27 ribu ton pada tahun 2017. Dari sisi nilai ekspor, meningkat dari US\$472 ribu menjadi US\$484 ribu pada periode 2017 hingga 2022. Hal ini menjadikan rajungan sebagai salah satu sumber kekuatan ekonomi Indonesia. Armada perikanan rajungan Indonesia sebagian besar didominasi

S.H. Suryawati*, R.A. Wijaya, A. Zamroni, H.M. Huda, & S. Koeshendrajana

*Badan Riset dan Inovasi Nasional, *e-mail*: siti102@brin.go.id

© 2023 Editor & Penulis

Suryawati, S. H., Wijaya, R. A., Zamroni, A., Huda, H. M., & Koeshendrajana, S. (2023). Peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan. Dalam K. Amri, H. Latuconsina, & R. Triyanti (Ed.), *Pengelolaan sumber daya perikanan laut berkelanjutan* (315–346). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.908.c760 E-ISBN: 978-623-8372-50-8

oleh perikanan skala kecil kurang dari 10 GT. Jaring insang, bubu, dan *mini trawl* merupakan alat tangkap utama yang digunakan nelayan untuk menangkap rajungan. Alat tangkap lain (*trammel net*, cantrang, dogol, sero) juga sering kali mendapatkan rajungan sebagai hasil tangkapan sampingan (Adam et al., 2006; Gardenia, 2006).

Perikanan rajungan berkontribusi terhadap ekonomi masyarakat pesisir. Pada tahun 2018, diestimasi sekitar 90 ribu nelayan, 185 ribu pengolah/pengupas rajungan (*pickers*), pedagang pengumpul, pelaku usaha *plant* (pengolahan rajungan), dan *miniplant* (unit mitra dari *plant* yang bertanggung jawab terhadap proses pengupasan daging rajungan) terlibat secara langsung terhadap perikanan rajungan mulai dari aktivitas penangkapan, penyortiran, perebusan, pengupasan, dan perdagangan (Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia [APRI], 2018). Jumlah ini terus meningkat karena harga jual rajungan lebih tinggi dibandingkan dengan produk perikanan lain. Zamroni et al. (2020) menyatakan pada tingkat nelayan, harga jual rajungan pada tahun 2020 berkisar antara Rp60.000–Rp100.000/kg, sedangkan upah pengupas rajungan berkisar antara Rp15.000–Rp20.000/kg. Harga jual dan upah tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat nelayan.

Tingginya nilai ekonomi rajungan dan permintaan daging rajungan dari pasar ekspor menyebabkan harga rajungan makin tinggi di pasar domestik maupun ekspor sehingga mendorong nelayan untuk mengeksploitasinya secara berlebihan (Setiyowati & Sulistyawati, 2019). Penangkapan yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang tepat bukan tidak mungkin berujung pada kepunahan (Huda et al., 2021).

Pengelolaan perikanan termasuk perikanan rajungan harus menjamin ketersediaan sumber daya yang cukup untuk generasi sekarang dan masa yang akan datang. Hal tersebut sejalan dengan amanat *Code of Conduct Responsible Fisheries* (FAO, 1995). Untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan sumber daya rajungan, perlu diperhatikan daya dukung lingkungan laut yang menjadi habitatnya, termasuk berapa kapasitas maksimal yang dapat dimanfaatkan. Terkait

hal tersebut, melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 dan Nomor 16 Tahun 2022 terkait pengelolaan perikanan rajungan di Wilayah Negara Republik Indonesia, pemerintah berupaya memastikan pemanfaatan sumber daya rajungan secara berkelanjutan. Pada pengelolaan rajungan, dari sisi alat tangkap, pemerintah memastikan alat tangkap yang digunakan untuk menangkap rajungan bersifat pasif dan ramah lingkungan. Pada sisi sumber daya rajungan itu sendiri, penangkapan dapat dilakukan dengan ketentuan rajungan tidak dalam kondisi bertelur dan telah dewasa dengan ukuran berat minimal 60 gram per ekornya.

Implementasi teknis dalam pengelolaan rajungan saat ini masih terus diupayakan meskipun mengalami kendala untuk dijalankan. Banyaknya jumlah nelayan rajungan, luasnya wilayah yang diawasi, termasuk pula ketersediaan jumlah pengawas perikanan yang terbatas menjadi faktor penyebab implementasi tersebut sulit berjalan. Potensi sumber daya rajungan, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022, mencapai 57.947 ton per tahun dengan dominasi potensi sumber daya rajungan dari Laut Jawa sebesar 40%. Namun, sayangnya, Laut Jawa sebagai sumber produksi utama komoditas rajungan Indonesia dilaporkan mengalami tanda-tanda *overfishing* (Budiarto et al., 2015; Muawanah et al., 2017). Ukuran rajungan yang tertangkap dilaporkan tidak lebih besar, bahkan lebih kecil dibandingkan komoditas rajungan yang ada di perairan lainnya. Status lingkungan perairan dan penangkapan rajungan yang ada di perairan Laut Jawa dapat dikategorikan kurang baik (Badiuzzaman et al., 2014; Budiarto et al., 2015; Nabila et al., 2023; Setiyowati & Sulistyawati, 2019).

Perikanan rajungan memerlukan pengelolaan yang tepat mengingat banyaknya jumlah keterlibatan nelayan dan pengupas rajungan skala kecil yang masih dominan. Keberlanjutan sumber daya rajungan sejatinya tidak hanya mengatur nelayan sebagai pelaku utama ekstraksi sumber daya rajungan, tetapi juga pemangku kepentingan lain yang berperan dalam pengelolaan perikanan rajungan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, penegak hukum, pengolah rajungan (skala

rumah tangga, *miniplant*, dan *plant*), pedagang, dan pihak lainnya yang terkait dengan perikanan rajungan sangat berperan terhadap keberhasilan pengelolaan rajungan. Karakter pengelolaan perikanan rajungan dapat dikatakan sebagai sebuah sistem multiaktor, yaitu sering melibatkan berbagai aktor pemangku kepentingan pada pengembangan maupun implementasinya. Untuk itu, perlu dilakukan analisis terkait karakteristik pemangku kepentingan dan hubungan antaraktor dalam pengelolaan perikanan rajungan. Hasil analisis tersebut untuk memberikan rekomendasi yang tepat berdasarkan peta kekuatan dan dukungan serta peluang munculnya konflik dalam tata kelola perikanan rajungan.

Bab ini fokus pada identifikasi pemangku kepentingan dan perannya dalam pengelolaan perikanan rajungan, mendeskripsikan kekuatan pemangku kepentingan terhadap tujuan pengelolaan, serta mendeskripsikan pola keterhubungan antar-pemangku kepentingan dalam pengelolaan rajungan. Bab ini merupakan hasil studi di pantai utara Jawa dengan studi kasus Kabupaten Cirebon sebagai pusat produksi rajungan di Provinsi Jawa Barat. Pendekatan *mixed method* yang memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif digunakan untuk memperoleh gambaran tentang karakteristik pemangku kepentingan dalam pengelolaan rajungan secara menyeluruh. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan kunci yang ditindaklanjuti dengan diskusi kelompok terpumpun (FGD) bersama pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat analisis. Selanjutnya, data dianalisis pada aplikasi *Matrix of Alliances and Conflicts Tactics, Objective, and Recommendation* (Mactor) oleh Godet (1991) yang banyak digunakan pada sumber daya kelautan perikanan (Kusumawardhani et al., 2023; Tandio et al., 2023). Mactor bekerja didasarkan pada pendekatan analisis struktural, yaitu melihat strategi dan inisiatif aktor berdasarkan pengaruh antaraktor yaitu, pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan pengaruh potensial (Fauzi, 2019; Wardono et al., 2019). Hasil studi diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga kepada *stakeholder* perikanan rajungan untuk perbaikan pengelolaan rajungan yang berkelanjutan di masa yang akan datang.

B. Identifikasi Pemangku Kepentingan dan Tujuan Strategis Pengelolaan Perikanan Rajungan

Keterlibatan dan peran aktor menjadi aspek yang krusial dalam tata kelola sumber daya alam (Hamilton & Ruta, 2006), termasuk dalam implementasi pembangunan berkelanjutan (Fauzi, 2019). Aktor didefinisikan sebagai lembaga, kelompok, atau individu yang memainkan peran sentral dalam sistem, termasuk memobilisasi sumber daya alam dalam sistem (Avelino & Wittmayer, 2016; Rees & MacDonell, 2017). Aktor bukan saja menentukan bagaimana tujuan keberlanjutan pembangunan dicapai, tetapi juga menentukan indikator yang menjadi pijakan keberlanjutan. Interaksi dan hubungan antaraktor, daya saing aktor, dan sikap aktor terhadap indikator keberlanjutan sering disebut sebagai *interaksi aktor-faktor*.

Identifikasi aktor kunci dan penentuan tujuan strategis para aktor dalam pengelolaan rajungan berkelanjutan menjadi langkah awal dalam analisis Mactor. Hasil identifikasi aktor menunjukkan terdapat 27 aktor yang berperan mewakili instansi pemerintahan pusat, daerah, pengusaha, organisasi masyarakat, pelaku usaha, dan sebagainya sebagai aktor kunci pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan (Tabel 9.1). Peran masing-masing aktor dalam pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan berbeda-beda. Pemerintah pusat hingga daerah umumnya memiliki peran sebagai perancang aturan maupun kebijakan pengelolaan perikanan rajungan (Wijaya et al., 2023), termasuk pula memiliki peran sebagai pengawas. Bagi pemerintah pusat, komoditas rajungan sangat penting dan perlu dikelola dengan baik. Dilihat dari perancangan aturannya, setidaknya terdapat lima aturan setingkat Menteri Kelautan dan Perikanan sepanjang periode 2015–2022 terkait pengelolaan rajungan. Selain itu, juga terdapat dokumen strategi pemanfaatan perikanan (*harvest strategy*) rajungan dan status pemanfaatan yang dapat diacu oleh *stakeholder* dalam pengelolaan perikanan rajungan. Dalam konteks tata ruang, telah diatur mengenai jalur penangkapan ikan dan alat penangkapan ikan yang harus diketahui oleh nelayan rajungan (Kurnia et al., 2014; Novitasari et al., 2023; Susanto et al., 2019; Taurusman et al., 2020).

Organisasi masyarakat terkait perikanan rajungan, yaitu Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI) berperan sebagai mitra pemerintah dalam mengimplementasikan pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan. Pelaku usaha, mulai dari nelayan rajungan, pedagang rajungan, *miniplant*, maupun *plant*, berperan dalam ekstraksi sumber daya dan penciptaan nilai tambah untuk memperoleh manfaat ekonomi dari sumber daya rajungan.

Tabel 9.1 Aktor yang Terlibat dan Perannya Terkait Pengelolaan Rajungan Berkelanjutan

Nama Aktor	Peran		
	Tata Kelola	Implementasi	Pengawasan
1. Dirjen Perikanan Tangkap [DJPT KKP]	Merancang aturan terkait alat tangkap, dan penangkapan rajungan		
2. Dirjen Perikanan Budidaya [DJPB KKP]	Mendorong produksi benih rajungan dengan tujuan <i>restocking</i>		
3. Dirjen Penguatan Daya Saing [DJPDS KKP]	Merancang aturan pascapenangkapan		
4. Dirjen Pengawasan SDKP [DJPSDKP]			Pengakuan aturan
5. Dirjen Pengelolaan Ruang Laut [DJURL KKP]	Merancang aturan terkait pengelolaan ruang laut		
6. Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu [BKIPM]			Karantina dan sistem jaminan mutu rajungan
7. Badan Riset dan SDM KP [BRSDM KKP]	Dukungan riset, pelatihan dan penyuluhan	Sosialisasi aturan terhadap pelaku	
8. Kementerian Koperasi RI [Kemenkop]		Dukungan implementasi aturan (Perdagangan rajungan)	
9. Bank Indonesia [BI]		Dukungan implementasi aturan	

Nama Aktor	Peran		
	Tata Kelola	Implementasi	Pengawasan
10. Dinas Kelautan Perikanan Provinsi [DKP Prop]	Merancang aturan terkait penangkapan rajungan		
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah [Bappeda]	Sinkronisasi perencanaan terkait perikanan rajungan		
12. Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten [DKP Kab]		Pemberdayaan nelayan rajungan	
13. Dinas Koperasi dan UKM [Dinkop UKM]		Dukungan implementasi aturan terkait perdagangan	
14. Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia [APRI]		Implementasi aturan rajungan di tingkat nelayan	Pengawasan terhadap implementasi aturan
15. Kelompok Usaha Bersama [KUB]		Implementasi aturan rajungan	
16. Koperasi Nelayan [Koperasi]		Dukungan implementasi aturan (Perdagangan rajungan)	
17. Perusahaan Pengolahan Rajungan [<i>Plant</i>]		Implementasi aturan dan perdagangan rajungan	
18. Unit Pengolahan Rajungan [<i>Miniplant</i>]		Implementasi aturan, penciptaan nilai tambah dan perdagangan rajungan	
19. Perusahaan eksportir [Eksportir]		Implementasi aturan, penciptaan nilai tambah dan perdagangan rajungan	
20. Pedagang pengumpul [Bakul]		Implementasi aturan dan perdagangan rajungan	
21. Nelayan [Nelayan]		Implementasi aturan, ekstraksi sumber daya dan perdagangan rajungan	

Nama Aktor	Peran		
	Tata Kelola	Implementasi	Pengawasan
22. Pembudidaya [Pembudidaya]		Implementasi aturan terkait <i>restocking</i> rajungan	
23. Penyuluh perikanan [Penyuluh]		Sosialisasi dan pemberdayaan nelayan rajungan	
24. Pemerintah desa [Pemdes]		Sosialisasi dan pemberdayaan nelayan rajungan	
25. Masyarakat [Masyarakat]		Pemanfaatan sumber daya untuk konsumsi	
26. Perguruan tinggi/ akademisi [PT]	Memberikan masukan terkait aturan penangkapan rajungan		
27. Pemerhati rajungan [NGO]			Pengawasan terhadap implementasi aturan

Sumber: Zamroni et al. (2020)

Berbagai macam peran aktor pada Tabel 9.1 juga berkaitan dengan tujuan strategis apa yang akan dicapai oleh masing-masing aktor. Terdapat setidaknya sepuluh tujuan strategis para aktor yang teridentifikasi dalam pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan (Gambar 9.1). Pengendalian upaya penangkapan, penggunaan alat tangkap, waktu penangkapan, kualitas hasil tangkapan, zonasi wilayah tangkap hingga sosialisasi menjadi tujuan strategis dari 27 aktor yang terkait dengan pengelolaan rajungan. Para aktor umumnya tidak hanya memiliki satu tujuan strategis, tetapi beberapa tujuan strategis sesuai dengan kepentingan masing-masing aktor. Sebagai contoh, pemerintah pusat memiliki strategi terkait dengan pengendalian upaya penangkapan, termasuk pula mendorong penggunaan alat tangkap ramah lingkungan bagi nelayan.



Gambar 9.1 Tujuan Strategis Aktor-Aktor dalam Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan

C. Pemetaan Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Antar-Pemangku Kepentingan

Pemetaan para aktor yang terkait dan terlibat dalam upaya pengelolaan rajungan berkelanjutan menjadi penting dilakukan terkait peran dan posisinya. Posisi aktor dinilai dari seberapa besar tingkat pengaruh dan tingkat ketergantungan setiap aktor terhadap aktor lainnya dalam pengelolaan rajungan berkelanjutan. Tabel 9.2 menginformasikan matriks pengaruh langsung (*matrix of direct influences*, MDI) aktor pengelolaan sumber daya rajungan. MDI menggambarkan kemampuan aktor untuk memengaruhi aktor lain, baik dalam hal prosedur operasional, perencanaan, implementasi, maupun pelaksanaan suatu kegiatan/pekerjaan yang dilakukan oleh aktor lain (Ariyani et al., 2020). Kepemilikan sumber daya, posisi sosial, dan pengetahuan menjadi faktor yang akan menentukan pengaruh kepada aktor lainnya (Tronvoll, 2017). Kategori nilai pengaruh langsung antaraktor diukur dengan kaidah Godet (1991) sebagai berikut.

- 1) Nilai 0 berarti tidak berpengaruh.
- 2) Nilai 1 berarti memengaruhi prosedur operasional aktor.

- 3) Nilai 2 berarti memengaruhi aktivitas kinerja aktor.
- 4) Nilai 3 berarti memengaruhi misi aktor.
- 5) Nilai 4 berarti memengaruhi eksistensi keberadaan aktor.

Tabel 9.2 menunjukkan bahwa makin sedikit rekap nilai 0 (nol) maka aktor tersebut tidak memiliki pengaruh yang kuat atau pengaruh langsung terhadap aktor lain. Sementara itu, jika makin banyak nilai 4 (empat), dapat dikatakan bahwa aktor tersebut cukup dominan pengaruhnya dalam pengelolaan sumber daya perikanan rajungan. Aktor Nelayan dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (DJPT KKP) merupakan dua aktor dominan dalam pengelolaan perikanan rajungan. DJPT KKP membuat berbagai macam aturan, tidak hanya dapat memengaruhi prosedur operasional aktor, bahkan hingga dapat memengaruhi eksistensi keberadaan aktor lain, sebagai contoh keberadaan nelayan dalam memanfaatkan sumber daya perikanan rajungan.

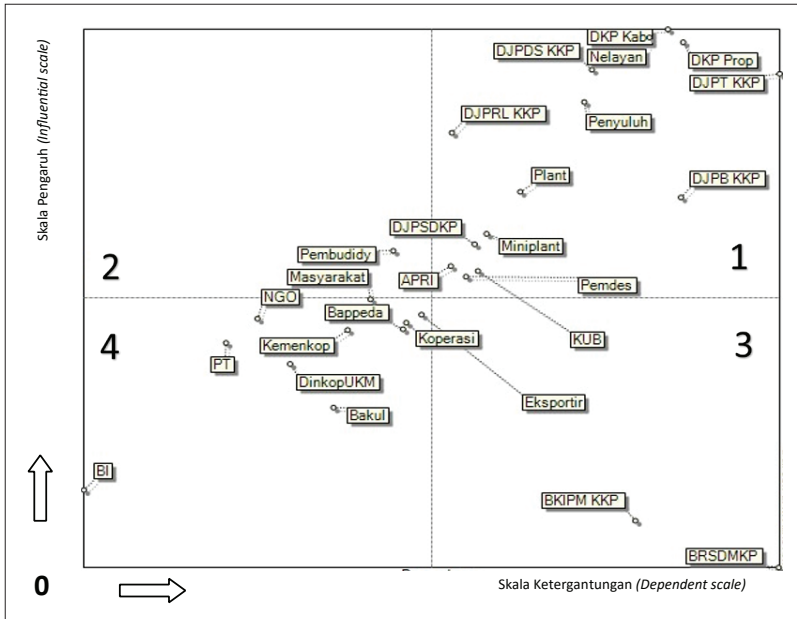
Tabel 9.2 Komposisi Nilai Kategori Pengaruh Langsung Antaraktor (MDI) dalam Pengelolaan Sumber Daya Rajungan Berkelanjutan

Aktor Pengelolaan Rajungan	Komposisi Nilai Kategori Pengaruh Aktor terhadap Aktor lain				
	0	1	2	3	4
1. Dirjen Perikanan Tangkap [DJPT KKP]	5	3	5	4	10
2. Dirjen Perikanan Budidaya [DJPB KKP]	8	9	0	5	5
3. Dirjen Penguatan Daya Saing [DJPDS KKP]	3	9	2	7	6
4. Dirjen Pengawasan SDKP [DJPSDKP]	12	4	3	2	6
5. Dirjen Pengelolaan Ruang Laut [DJPLR KKP]	8	5	1	6	7
6. Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu [BKIPM]	21	1	1	2	2
7. Badan Riset dan SDM KP [BRSDM KKP]	22	1	3	0	1
8. Kementerian Koperasi RI [Kemenkop]	8	14	3	0	2
9. Bank Indonesia [BI]	16	9	2	0	0
10. Dinas Kelautan Perikanan Provinsi [DKP Prop]	1	9	7	4	6

Aktor Pengelolaan Rajungan	Komposisi Nilai Kategori Pengaruh Aktor terhadap Aktor lain				
	0	1	2	3	4
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah [Bappeda]	8	13	4	1	1
12. Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten [DKP Kab]	1	9	8	2	7
13. Dinas Koperasi dan UKM [Dinkop UKM]	9	15	2	1	0
14. Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia [APRI]	7	13	3	3	1
15. Kelompok Usaha Bersama [KUB]	9	11	1	4	2
16. Koperasi Nelayan [Koperasi]	6	19	1	1	0
17. Perusahaan Pengolahan Rajungan [<i>Plant</i>]	6	9	7	4	1
18. Unit Pengolahan Rajungan [<i>Miniplant</i>]	5	13	5	3	1
19. Perusahaan eksportir [Eksportir]	8	13	4	1	1
20. Pedagang pengumpul [Bakul]	15	5	4	2	1
21. Nelayan [Nelayan]	2	6	3	7	9
22. Pembudidaya [Pembudidaya]	9	6	4	3	5
23. Penyuluh Perikanan [Penyuluh]	3	12	3	7	2
24. Pemerintah desa [Pemdes]	6	14	7	0	0
25. Masyarakat [Masyarakat]	6	16	4	1	0
26. Perguruan Tinggi/Akademisi [PT]	8	15	3	1	0
27. Pemerhati Rajungan [NGO]	8	16	2	1	0

Sumber: Zamroni et al. (2020)

Berdasarkan kekuatannya, pengaruh aktor dapat diposisikan dalam peta pengaruh dan ketergantungan aktor, daya saing aktor, dan hubungan antaraktor secara grafis (Gambar 9.2). Selanjutnya, dilakukan analisis dengan menggunakan perangkat lunak Mactor untuk melihat hubungan antaraktor, daya saing aktor, dan hubungan aktor dengan tujuan yang direpresentasikan dalam bentuk grafis (Fauzi, 2019). Aktor dapat diposisikan menjadi empat kategori berdasarkan tinggi rendahnya pengaruh dan ketergantungan (Elmsalmi & Hachicha, 2014).



Keterangan:

Kuadran 1 = aktor dengan pengaruh tinggi dan ketergantungan tinggi

Kuadran 2 = aktor dengan pengaruh tinggi dan ketergantungan rendah

Kuadran 3 = aktor dengan pengaruh rendah dan ketergantungan rendah

Kuadran 4 = aktor dengan pengaruh rendah dan ketergantungan rendah

Sumber: Zamroni et al. (2020)

Gambar 9.2 Peta Pengaruh dan Ketergantungan Antaraktor dalam Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan

Gambar 9.2 menunjukkan aktor mana yang perlu menjadi perhatian dan aktor mana yang dapat diabaikan dalam pengelolaan perikanan rajungan. Para aktor yang masuk ke dalam kuadran 1 merupakan aktor *relay* atau dapat menjadi pengungkit keberhasilan pengelolaan perikanan rajungan, sedangkan para aktor yang masuk ke dalam kuadran 4 tidak terlalu berperan atau dapat diabaikan dalam pengelolaan rajungan. Pada kuadran 1, terdapat dua bagian besar aktor, yaitu aktor yang berperan dalam mengawal kebijakan rajungan

dan aktor yang berperan dalam ekstraksi sumber daya dan penciptaan nilai tambah rajungan. Ketujuh aktor pemerintah (DJPT KKP, DKP Prop, DKP Kab, DJPDS, DJPRL, DJPB, dan Penyuluh) yang memiliki tupoksi perikanan kelautan pada berbagai level pemerintah nyatanya memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan terkait pengelolaan rajungan. Pada hasil ini, penyuluh perikanan sebagai perpanjangan tangan KKP pada level pemerintahan terkecil, yaitu pemerintah desa, juga dapat berperan dalam merumuskan aturan terkait pengelolaan rajungan melalui peraturan desa yang lebih relevan terhadap kondisi karakteristik masyarakatnya (Istikasari et al., 2016). Kebijakan pemerintah, di satu sisi bertujuan untuk melindungi sumber daya rajungan agar tidak dieksplorasi terus-menerus, di sisi lain memastikan keberlangsungan usaha nelayan. Sementara itu, aktor nelayan, *plant*, *miniplant*, dan APRI bertugas dalam melaksanakan implementasi kebijakan pengelolaan rajungan. Kedua kelompok aktor pada kuadran 1 menjadi ujung tombak dan faktor penentu keberhasilan pengelolaan perikanan rajungan sehingga perlu melakukan kerja sama yang baik dalam hal perencanaan hingga implementasi pengelolaan perikanan rajungan.

Pada kuadran 2, masyarakat dan pembudidaya menjadi aktor yang dominan. Mereka dapat memengaruhi aktor lain, tetapi ketergantungannya terhadap aktor lain rendah. Pembudidaya rajungan dalam artikel ini diartikan sebagai nelayan dengan alat tangkap bubu yang memiliki wadah penampungan rajungan dalam kondisi bertelur. Hasil rajungan yang berasal dari alat tangkap bubu masih dalam keadaan hidup sehingga dapat diketahui kondisi rajungan. Aturan Permen KP No 16 Tahun 2022 menyatakan bahwa nelayan yang memperoleh rajungan dalam kondisi bertelur diamanatkan untuk melakukan karantina dan melepas anak rajungan kembali ke laut ketika telur sudah menetas (Sunartiningsih & Larasati, 2020).

Pada kuadran 3 terdapat aktor Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) dan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMP) yang berperan dalam melakukan penjaminan mutu dan ketertelusuran sebagai syarat ekspor

serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia nelayan rajungan baik melalui kegiatan riset, penyuluhan, maupun pelatihan (Hudaya et al., 2017; Simbolon et al., 2020). Kedua aktor tersebut terdominasi (dipengaruhi aktor lain) dan memiliki ketergantungan dengan aktor lain. Terdominasi berarti kegiatan kedua aktor tersebut tidak akan berjalan apabila tidak ada inisiasi kegiatan dari aktor lainnya. Sebagai contoh, nelayan melakukan penangkapan rajungan yang kemudian dilakukan proses nilai tambah produk oleh *miniplant* hingga *plant* rajungan. Dalam konteks perdagangan internasional, diperlukan sertifikasi/jaminan mutu oleh BKIPM terhadap produk yang dihasilkan oleh aktor tersebut. Tanpa adanya inisiasi penangkapan dan penciptaan nilai tambah rajungan maka tidak diperlukan jaminan mutu oleh aktor BKIPM. Dengan kata lain, aktor-aktor pada kuadran 3 memiliki sifat pelayanan terkait implementasi pengelolaan perikanan rajungan.

D. Keterkaitan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Rajungan Berkelanjutan

Hasil analisis berikutnya adalah melihat posisi masing-masing aktor terhadap setiap tujuan strategis dalam pengelolaan rajungan berkelanjutan yang telah teridentifikasi sebelumnya melalui matriks penimbang posisi aktor (Tabel 9.3). Dapat terlihat koefisien mobilisasi aktor yang menunjukkan bahwa antaraktor yang berbeda dapat terlibat dalam satu situasi yang sama. Lebih lanjut, matriks ini juga dapat memperhitungkan tingkat kompetisi di antara para aktor, hierarki tujuan, dan derajat pendapat masing-masing aktor terhadap setiap tujuan dalam pengelolaan rajungan berkelanjutan. Nilai positif menyatakan dukungan aktor terhadap tujuan pengelolaan rajungan dan nilai negatif menunjukkan sikap sebaliknya, yaitu menyatakan oposisi atau menentang tujuan. Nilai positif besar menunjukkan makin besarnya dukungan aktor terhadap tujuan. Sebaliknya, nilai negatif besar menyatakan makin tingginya penolakan terhadap tujuan. Bagi para pembuat kebijakan dan praktisi pembangunan yang peduli terhadap kesetaraan dan keberlanjutan perikanan, tata kelola yang

baik di berbagai tingkatan pengelolaan adalah komponen yang sangat penting dalam ketahanan pangan global (Warren & Steenbergen, 2021).

Analisis berikutnya adalah pemetaan kepentingan para aktor terhadap tujuan pengelolaan rajungan. Tingkat kepentingan suatu tujuan digambarkan dengan makin kuatnya dukungan para aktor terhadap tujuan tersebut. Mengacu kepada dokumen *Harvest Strategy* Rajungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan 712, setidaknya terdapat dua tujuan pengelolaan rajungan, yaitu tujuan keberlanjutan sosial ekonomi dan tujuan ekologi. Tabel 9.3 menunjukkan bahwa tujuan strategis kesejahteraan masyarakat memiliki derajat mobilisasi tertinggi, yaitu sebesar 78,8 yang diikuti oleh pemasaran dan bisnis (63,9) serta kualitas rajungan hasil tangkapan (58,8). Aktor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi (DKP Provinsi), DJPT, Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten (DKP Kab), Penyuluh, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DJPSDKP), dan Nelayan menjadi enam aktor dengan mobilisasi tertinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa para aktor relatif mengutamakan aspek ekonomi dibandingkan ekologi. Sebagaimana disebutkan oleh Mubaroq dan Jailani (2022), tuntutan terhadap kesejahteraan masyarakat, pemasaran dan bisnis, serta kualitas rajungan hasil tangkapan menjadi tujuan yang paling banyak memobilisasi peran para aktor yang terlibat dalam pengelolaan perikanan rajungan. Hasil ini bertolak belakang dengan kondisi sumber daya rajungan yang telah tereksplorasi. Seharusnya, tujuan ekologi menjadi faktor pendorong mobilisasi peran para aktor (Badiuzzaman et al., 2014; Budiarto et al., 2015; Nabila et al., 2023; Setiyowati & Sulistyawati, 2019). Tarik-menarik kepentingan ekonomi dan ekologi terjadi dalam pengelolaan rajungan. Sunartiningih dan Larasasi (2020) mengkaji kegiatan *restocking* rajungan sebagai salah satu solusi dalam mengatasi adanya perbedaan kepentingan tersebut. Idealnya, eksploitasi sumber daya rajungan dengan tujuan ekonomi dapat dilakukan sepanjang sumber daya masih dalam kondisi baik dan stok melimpah. Saat sumber daya telah berada dalam kondisi tereksplorasi maka tujuan ekologi, misalnya konservasi rajungan, dapat didorong sebagai faktor mobilisasi para aktor.

Tabel 9.3 Matriks Posisi Setiap Aktor terhadap Setiap Tujuan Strategis Pengelolaan Rajungan Berkelanjutan

Aktor	Koefisien Mobilisasi Aktor Terhadap Tujuan Strategis (TS)*										Nilai Mobilisasi*	Peringkat	
	TS1	TS2	TS3	TS4	TS5	TS6	TS7	TS8	TS9	TS10			
1. Dirjen Perikanan Tangkap [DIJPT KKP]	5,3	5,3	5,3	5,3	4,0	5,3	5,3	4,0	4,0	4,0	4,0	47,4	2
2. Dirjen Perikanan Budidaya [DJPB KKP]	1,0	1,0	1,0	3,0	3,0	4,0	4,0	3,0	0,0	0,0	0,0	20,1	12
3. Dirjen Penguatan Daya Saing [DJPDS KKP]	3,1	3,1	3,1	6,1	0,0	3,1	6,1	6,1	1,5	1,5	1,5	33,6	7
4. Dirjen Pengawasan SDPK [DJPSDKP]	4,1	4,1	3,1	3,1	4,1	4,1	4,1	2,0	3,1	3,1	3,1	34,7	5
5. Dirjen Pengelolaan Ruang Laut [DJURL KKP]	2,9	2,9	2,9	2,9	5,8	4,3	2,9	2,9	1,4	2,9	2,9	31,8	8
6. Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu [BKIPM]	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,5	0,2	0,3	0,3	4,5	24
7. Badan Riset dan SDM KP [BRSDM KKP]	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	2,0	26
8. Kementerian Koperasi RI [kemenkop]	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	2,6	2,6	0,0	0,9	0,9	6,8	20
9. Bank Indonesia [BI]	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	2,2	2,2	0,6	0,0	0,0	5,5	22
10. Dinas Kelautan Perikanan Provinsi [DKP Prop]	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	59,3	1
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah [Bappeda]	0,0	0,0	0,0	0,8	3,2	2,4	3,2	1,6	0,0	0,0	0,0	11,3	17
12. Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten [DKP Kab]	4,8	4,8	3,2	4,8	3,2	4,8	4,8	3,2	4,8	4,8	4,8	43,0	3
13. Dinas Koperasi dan UKM [Dinkop UKM]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	4,7	23
14. Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia [APRI]	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0	2,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	19,7	14
15. Kelompok Usaha Bersama [KUB]	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	2,8	2,8	2,8	1,9	0,9	0,9	20,8	10
16. Koperasi Nelayan [Koperasi]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	6,6	21
17. Perusahaan Pengolahan Rajungan [Plant]	-2,4	-2,4	-1,2	-1,2	0,0	0,0	3,5	4,7	-2,4	2,4	2,4	20,0	13
18. Unit Pengolahan Rajungan [Miniplant]	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	3,2	2,1	2,1	3,2	2,1	23,2	9
19. Perusahaan eksportir [Eksportir]	1,7	2,5	1,7	1,7	1,7	0,8	1,7	1,7	-2,5	1,7	1,7	17,7	16
20. Pedagang pengumpul [Bakul]	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	2,4	25
21. Nelayan [Nelayan]	4,7	-4,7	4,7	4,7	0,0	0,0	4,7	0,0	-6,3	-4,7	-4,7	34,4	6
22. Pembudidaya [Pembudidaya]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27
23. Penyuluh Perikanan [Penyuluh]	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	2,9	4,3	4,3	2,9	1,4	3,7,1	37,1	4
24. Pemerintah desa [Pemdes]	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	2,8	1,9	1,9	1,9	1,9	19,6	15
25. Masyarakat [Masyarakat]	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	2,8	1,9	1,9	2,8	1,9	20,8	10

Aktor	Koefisien Mobilisasi Aktor Terhadap Tujuan Strategis (TS)*										Nilai Mobilisasi*	Peringkat
	TS1	TS2	TS3	TS4	TS5	TS6	TS7	TS8	TS9	TS10		
26. Perguruan Tinggi/Akademisi [PT]	0,9	0,9	0,0	0,9	1,9	0,9	0,9	0,9	0,0	1,9	9,4	19
27. Pemerintah Rajungan [NGO]	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	11,0	18
Jumlah Kesepakatan	50,2	46,4	45,7	57,6	48,6	51,0	78,8	63,3	35,2	41,2		
Jumlah Ketidaksepakatan	-2,4	-8,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	-0,6	-11,1	-4,7		
Derajat Mobilisasi	52,6	54,6	46,9	58,8	48,6	51,0	78,8	63,9	46,4	45,9		

Keterangan:

TS1/Tangkap = Pengendalian upaya penangkapan

TS2/ATramah = Penggunaan alat tangkap ramah lingkungan

TS3/Waktu = kesesuaian waktu penangkapan

TS4/Kualitas = Kualitas hasil tangkapan

TS5/Zonasi = Zonasi daerah penangkapan

TS6/Preventif = Langkah pencegahan penerapan kebijakan

TS7/Sejahtera = Kesejahteraan masyarakat

TS8/Pasar = Pemasaran dan bisnis

TS9/Lembaga = Kelembagaan pengelola

TS10/Sosialisasi = Sosialisasi, pengawasan dan penegakan hukum

Derajat Mobilisasi = Total koefisien yang menunjukkan mobilitas aktor di mana antaraktor yang berbeda dapat terlibat dalam satu situasi yang sama.

Nilai positif menyatakan dukungan aktor terhadap tujuan pengelolaan rajungan dan sebaliknya nilai negatif menunjukkan sikap sebaliknya, yaitu menyatakan oposisi atau menentang tujuan.

*Nilai merupakan hasil pembulatan

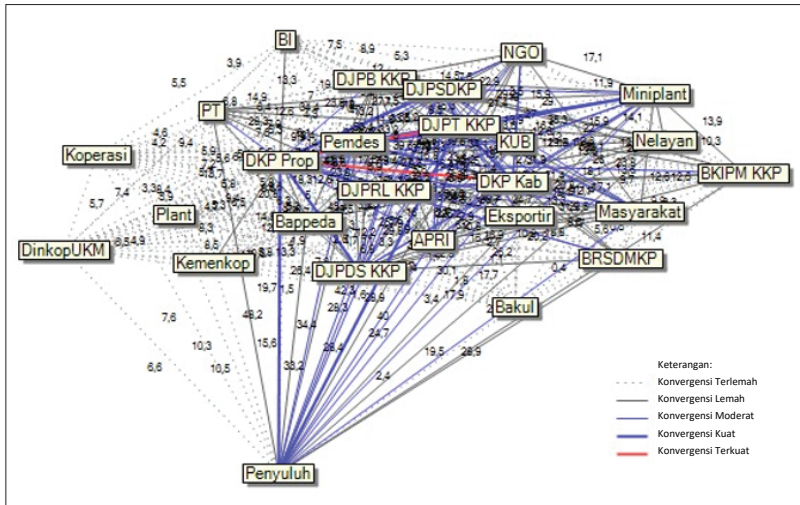
Sumber: Zamroni et al. (2020)

Pengelolaan rajungan secara berkelanjutan telah menjadi isu penting yang melibatkan banyak pihak sehingga pemerintah pusat membuat acuan bersama sesuai amanat dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Di antara seluruh tujuan, yang paling banyak mendapatkan dukungan adalah kesejahteraan masyarakat dengan nilai kesepakatan sebesar 78,8 dan yang mendapatkan paling banyak penolakan adalah kelembagaan pengelola dengan nilai ketidaksepakatan sebesar -11,1 (Tabel 9.3). Hal ini tepat karena arah kebijakannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

E. Pemetaan Konvergensi dan Divergensi Antar-Pemangku Kepentingan

Hasil analisis Mactor juga menunjukkan pencapaian tujuan strategis antaraktor. Tujuan strategis dapat dicapai apabila aktor memiliki peran dan posisi yang sama dalam suatu situasi. Pemetaan konvergensi antaraktor dapat mengidentifikasi sejumlah kesamaan posisi yang dimiliki para aktor terhadap tujuan-tujuan pengelolaan rajungan berkelanjutan. Nilai dalam matriks merepresentasikan derajat konvergensi satu aktor terhadap aktor lainnya. Makin tinggi nilainya maka makin besar kesamaan kepentingan atau tujuan yang dimiliki oleh para aktor tersebut. Dengan kata lain, dapat diketahui kemungkinan terbentuknya sebuah grup atau aliansi di antara para aktor yang dipetakan berdasarkan besaran nilai pada matriks konvergensi (Gambar 9.3).

Dari Gambar 9.3 terlihat bahwa antara DKP Provinsi, DKP Kabupaten, dan DJPT KKP memiliki tingkat konvergensi paling kuat. Hal ini menunjukkan ketiga aktor tersebut dapat membangun aliansi dalam pengelolaan perikanan rajungan. Ketiga aktor tersebut berkerja sama dalam melakukan upaya pengelolaan sumber daya ikan rajungan dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang dapat memberikan manfaat optimal. Beberapa kegiatan tersebut di antaranya adalah



Sumber: Zamroni et al. (2020)

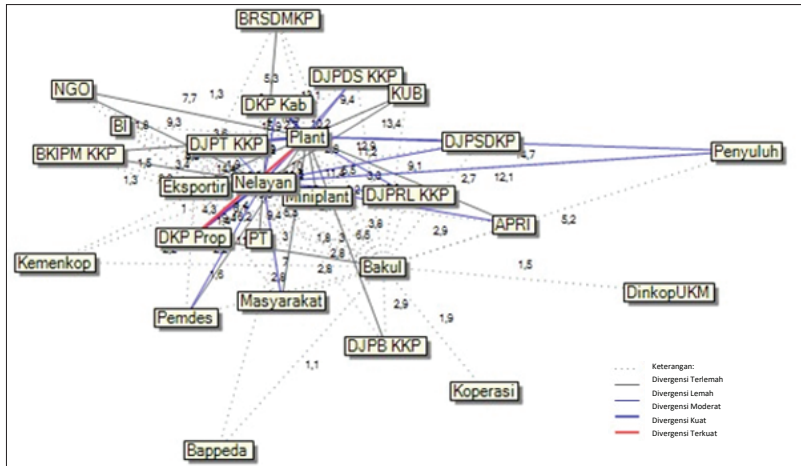
Gambar 9.3 Peta Konvergensi di Antara Para Aktor dalam Pengelolaan Rajungan Berkelanjutan

mendorong penertiban penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan serta penegakan hukum dan pengawasan terkait jalur penangkapan ikan.

Analisis terakhir adalah divergensi antaraktor yang dapat mengidentifikasi perbedaan posisi di antara para aktor terhadap tujuan atau strategi dalam pengelolaan rajungan berkelanjutan sehingga dapat diketahui kemungkinan terjadinya pertentangan atau konflik di antara mereka. Gambar 9.3 menunjukkan bahwa divergensi paling kuat terjadi antara pengusaha dan DKP Provinsi, DJPT KKP, DKP Kabupaten, serta Penyuluh. Hal ini menunjukkan bahwa pengusaha adalah aktor yang paling berpotensi konflik dengan aktor lain karena terdapat perbedaan kepentingan atau tujuan antara pengusaha dengan keempat aktor tersebut. Pengusaha berorientasi pada keberlanjutan stok rajungan untuk operasionalisasi usaha yang berimplikasi pada ketidakkonsistenan kualitas produk diterima.

Divergensi tinggi lainnya terlihat pada aktor nelayan dengan DKP Provinsi, DJPT KKP, DKP Kabupaten, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing (DJPDS), dan pengusaha. Kondisi ini dapat dijelaskan dalam dua hal. *Pertama*, nelayan berorientasi pada perolehan pendapatan sebagai sumber mata pencarian, sering kali tujuan tersebut dicapai dengan melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku dalam penangkapan rajungan, misalnya penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, menangkap rajungan bertelur, dan menangkap ukuran rajungan yang tidak memenuhi persyaratan. Alat tangkap tidak ramah lingkungan, seperti jaring garuk, akan menimbulkan konflik horizontal antar-sesama nelayan, kerugian ekonomi, rusaknya ekosistem, dan sumber daya rajungan (Bayyinah & Nurkhasanah, 2020; Susanto et al., 2022; Wibowo et al., 2016).

Kedua, dalam konteks rantai pasok, nelayan, pengepul/bakul, hingga pengusaha merupakan satu rangkaian distribusi yang memiliki keterkaitan kuat. Di antara faktor penguatnya adalah proses pemberian modal usaha maupun operasional oleh pengusaha kepada bakul dan nelayan serta sistem penentuan harga rajungan. Nelayan yang memiliki hutang kepada bakul maupun pengusaha akan menentukan harga jual rajungan di bawah harga normal, tetapi sayangnya pengurangan harga tersebut tidak dianggap sebagai cicilan atas hutang modal yang telah diberikan (Sulamah et al., 2016). Meskipun demikian, bakul dan pengusaha juga bermanfaat ketika musim rajungan tiba, yaitu saat hasil tangkapan rajungan melimpah. Para nelayan yang tidak memiliki keterikatan hutang akan sulit menjual rajungan hasil tangkapan. Sementara nelayan yang memiliki hutang memiliki kepastian kemana dia akan menjual rajungan. Selain itu, ketika ada permasalahan darurat, sebagai contoh keluarga nelayan yang sakit, bakul maupun pengusaha dapat memberikan santunan (Syatori, 2014).



Sumber: Zamroni et al. (2020)

Gambar 9.4 Kekuatan Divergensi Antaraktor dalam Pengelolaan Rajungan Berkelanjutan

F. Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Rajungan Berkelanjutan

Pengelolaan rajungan melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai level di mana berbagai kelembagaan, baik pemerintah pusat maupun daerah, formal dan informal juga turut terlibat. Oleh karena itu, kelembagaan dalam pengelolaan rajungan yang sifatnya multipihak ini perlu dikoordinasikan dengan baik. Untuk memudahkan proses, koordinasi dapat dibagi ke dalam beberapa kluster kelembagaan yang komprehensif dan dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan di level hulu sampai hilir. Kluster kelembagaan yang dimaksud dimulai dari kelembagaan produksi, pengawasan, keuangan, dan pemasaran rajungan.

Kelembagaan produksi berfungsi sebagai *supplier* sarana prasarana penangkapan ramah lingkungan, penetapan zonasi penangkapan, peningkatan kapasitas nelayan, sosialisasi aturan penangkapan rajungan, pengelolaan limbah rajungan, dan perlindungan ekosistem

mangrove. Kelembagaan pengawasan berfungsi sebagai penegakan aturan peralatan tangkap dan penegakan jual beli rajungan *undersize*. Kelembagaan keuangan berfungsi sebagai kemudahan akses pemodal, memutus ketergantungan nelayan rajungan dengan tengkulak dan rentenir, serta penyaluran kredit dan keringanan pajak. Sementara itu, kelembagaan pemasaran berfungsi sebagai standarisasi harga rajungan, efisiensi rantai pemasaran, dan memutus hubungan patron-klien.

Lembaga dari pemerintah pusat dari kementerian kelautan dan perikanan, seperti DJPT, DJPDS, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL), DJPSDKP, DKP Kabupaten, dan DKP Provinsi berperan sebagai regulator dan pengendali pemanfaatan sumber daya rajungan. Skema kelembagaan tersebut diusulkan dalam rangka menjaga keberlanjutan sumber daya rajungan, keadilan berusaha bagi pelaku usaha, dan keberlanjutan usaha para aktor (Tabel 9.4).

Tabel 9.4 Skema Kelembagaan Pengelolaan Rajungan secara Berkelanjutan

Jenis Kelembagaan	Fungsi Kelembagaan	Indikator	Aktor/ Stakeholders
Kelembagaan produksi	<i>Supply</i> sarana prasarana penangkapan yang ramah lingkungan	▪ Peningkatan produksi	▪ DJPT ▪ DJPRL
	Penetapan zonasi penangkapan	▪ Peningkatan pendapatan	▪ BRSDMKP ▪ Dinas KP Kab
	Peningkatan kapasitas nelayan	▪ Peningkatan nilai tambah	▪ Penyuluh perikanan ▪ Bappeda
	Sosialisasi aturan pelarangan rajungan bertelur dan berat <60 gram		▪ Dinas Koperasi & UKM
	Pengelolaan limbah cangkang rajungan		▪ Nelayan
	Perlindungan ekosistem mangrove		

Jenis Kelembagaan	Fungsi Kelembagaan	Indikator	Aktor/ Stakeholders
Kelembagaan pengawasan	Penegakan aturan administrasi penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, ukuran rajungan yang ditangkap, dan daerah penangkapan Penegakan jual beli rajungan <i>undersize</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan tingkat kepatuhan pelaku usaha 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PSDKP ▪ DJPT ▪ Dinas KP Prov ▪ Pokmaswas
Kelembagaan keuangan	Kemudahan akses permodalan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan produksi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DJPT ▪ LPMUKP ▪ Perbankan ▪ Dinas Koperasi & UKM
	Memutus ketergantungan nelayan dengan tengkulak dan rentenir Penyaluran kredit, keringanan bunga bank, pembebasan pajak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaminan pendapatan pada saat <i>off-season</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koperasi ▪ Bumdes
Kelembagaan pemasaran	Standardisasi harga	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaminan pasar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DJPDSKP
	Efisiensi rantai pemasaran Memutus hubungan patron-klien yang bersifat eksploitasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keadilan berusaha bagi pelaku usaha 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BKIPM ▪ Perusahaan/eksportir ▪ Asosiasi

Sumber: Zamroni et al. (2020)

G. Penutup

Aktor yang terlibat dalam pengelolaan rajungan berkelanjutan berasal dari ruang kekuasaan yang berbeda, antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Tujuan favorit yang didukung para aktor teridentifikasi sehingga dapat dijadikan dasar untuk mendapat dukungan dalam pelaksanaannya. Hasil ini menunjukkan adanya perbedaan kepentingan atau tujuan antaraktor. Sebagian aktor berorientasi pada keberlanjutan stok rajungan untuk operasionalisasi usaha yang berimplikasi pada ketidakkonsistenan kualitas produk diterima, sedangkan aktor lainnya berorientasi pada perolehan pendapatan sebagai sumber mata pencarian sehingga sering kali tujuan tersebut

dicapai dengan melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku dalam penangkapan rajungan. Sebagai contoh, menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan serta menangkap rajungan bertelur dan menangkap rajungan dengan ukuran yang tidak memenuhi persyaratan.

Tujuan pencapaian kesejahteraan masyarakat memiliki derajat mobilisasi tertinggi diikuti oleh tujuan pemasaran dan bisnis, serta tujuan kualitas rajungan hasil tangkapan. Hal ini dapat dicapai dengan menggerakkan aktor-aktor yang memiliki pengaruh yang tinggi, terutama yang merupakan perwakilan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Aktor-aktor yang memiliki pengaruh tinggi, antara lain, (1) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP, (2) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, (3) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP, (4) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP, (5) Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Barat, (6) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten, dan (7) Penyuluh Perikanan. Selain memiliki pengaruh tinggi, ketujuh aktor tersebut juga memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap aktor lainnya dalam pengelolaan sumber daya rajungan. Oleh karena itu, para aktor tersebut cenderung memilih untuk mengambil sikap saling menunggu satu sama lain. Empat aktor di antaranya merupakan pemangku kepentingan dari tingkat pusat. Posisi ini dapat dioptimalkan dalam melakukan kolaborasi dan koordinasi untuk merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya rajungan berkelanjutan. Kolaborasi dan koordinasi dapat dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan yang langsung berinteraksi dengan pemanfaat sumber daya.

Untuk itu, pengembangan kelembagaan dengan sistem klusterisasi dari hulu ke hilir dapat menjembatani perbedaan tujuan dari berbagai pemangku kepentingan. Masing-masing dapat menjalankan peran sesuai dengan fungsinya sehingga setiap pemangku kepentingan dapat berkontribusi tanpa mengganggu kewenangan pihak lain.

Referensi

- Adam, Jaya, I., & Sondita, M. F. A. (2006). Model bioekonomi perairan pantai (*in-shore*) dan lepas pantai (*off-shore*) untuk pengelolaan perikanan rajungan (*Portunus pelagicus*) di perairan Selat Makassar. *Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan dan Perikanan Indonesia*, 13(1), 33–43. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=122495&lokasi=lokal>
- Agustina, E. R., Mudzakir, A. K., & Yulianto, T. (2014). Analisis distribusi pemasaran rajungan (*Portunus pelagicus*) di Desa Betahwalang Kabupaten Demak. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, 3(3), 190–199. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jfrumt/article/view/5543/5343>
- Ariyani, N., Fauzi, A., & Umar, F. (2020). Model hubungan aktor pemangku kepentingan dalam pengembangan potensi pariwisata Kedung Ombo. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 23(2), 357–378. <http://dx.doi.org/10.24914/jeb.v23i2.3420>
- Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI). (2018). [Data tidak diterbitkan terkait pekerja pada industri rajungan].
- Avelino, F., & Wittmayer, J. M. (2016). Shifting power relations in sustainability transitions: A multi-actor perspective. *Journal of Environmental Policy and Planning*, 18(5), 628–649. <https://doi.org/10.1080/1523908X.2015.1112259>
- Badiuzzaman, Wijayanto, D., & Yulianto, T. (2014). Analisis potensi tangkap sumber daya rajungan (Blue swimming crab) di perairan Demak. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, 3(3), 248–256. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jfrumt/article/view/5570/5373>
- Bayyinah, A. A., & Nurkhasanah, D. (2020). Status alat tangkap jaring kejer di Cirebon, Jawa Barat. *Marine Fisheries: Jurnal Teknologi dan Manajemen Perikanan Laut*, 11(2), 135–146. <https://doi.org/10.29244/jmf.v11i2.32545>
- Budiarto, A., Adrianto, L., & Kamal, M. (2015). Status pengelolaan perikanan rajungan (*Portunus pelagicus*) dengan pendekatan ekosistem di Laut Jawa (WPPNRI 712). *Jurnal Kebijakan*

- Perikanan Indonesia*, 7(1), 9–15. <http://dx.doi.org/10.15578/jkpi.7.1.2015.9-24>
- Elmsalmi, M., & Hachicha, W. (2014). Risk mitigation strategies according to the supply actors' objectives through MACTOR method. *International Conference on Advanced Logistics and Transport (ICALT 2014)*, 362–367. <https://doi.org/10.1109/ICAdLT.2014.6866339>
- FAO. (1995). *Code of conduct for responsible fisheries*. https://www.wto.org/english/tratop_e/rulesneg_e/fish_e/1995_fao_ccrf.pdf
- Fauzi, A. (2019). *Teknik analisis keberlanjutan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Gardenia, Y. T. (2006). *Teknologi penangkapan pilihan untuk perikanan rajungan di perairan Gebang Mekar Kabupaten Cirebon* [Skripsi tidak diterbitkan]. Institut Pertanian Bogor.
- Godet, M. (1991). Actors' moved and strategies: The method an air transport case study. *Futures*, 23(6), 605–622. [https://doi.org/10.1016/0016-3287\(91\)90082-D](https://doi.org/10.1016/0016-3287(91)90082-D)
- Hamilton, K., & Ruta, G. (2006). Measuring social welfare and sustainability. *Statistical Journal of the United Nations Economic Commission for Europe*, 23(4), 277–288. <http://dx.doi.org/10.3233/SJU-2006-23405>
- Hardjito, L. (2006). Chitosan sebagai bahan pengawet pengganti formalin. *Jurnal Pangan*, 15(1), 80–84. <https://www.jurnalpangan.com/index.php/pangan/article/view/284>
- Huda, H. M., Wijaya, R. A., Triyanti, R., Sari, Y. D., & Zamroni, A. (2021). Status dan permasalahan pemanfaatan sumber daya rajungan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 11(2), 119–126. <https://doi.org/10.15578/jksekp.v11i2.9536>
- Hudaya, Y., Hubeis, A. V., Sugihen, B. G., & Fatchiya, A. (2017). Pemberdayaan pengolah ikan skala rumah tangga di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 12(2), 189–202. <https://doi.org/10.15578/jksekp.v12i2.6433>

- Istikasari, I., Mudzakir, A. K., & Wijayanto, D. (2016). Analisis bioekonomi rajungan (*Portunus pelagicus*) menggunakan pendekatan swept area dan Gordon-Schaefer di perairan Demak. *Journal of Fisheries Resource Utilization Management and Technology*, 4(4), 29–38. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jfrumt/article/view/9818/9530>
- Keputusan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik. (2016). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/159762/kepmen-kkp-no-70kepmen-kp2016-tahun-2016>.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. (2022). <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DitJaskel/peraturan/Kepmen%20KP%20Nomor%2019%20Tahun%202022%20tentang%20Estimasi%20Potensi%2C%20JTB%20dan%20Tingkat%20Pemanfaatan%20SDI%20di%20WPPNRI.pdf>
- Kurnia, R., Boer, M., & Zairion. (2014). Biologi populasi rajungan (*Portunus pelagicus*) dan karakteristik lingkungan habitat esensialnya sebagai upaya awal perlindungan di Lampung Timur. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI)*, 19(1), 22–28. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/JIPI/article/view/8402>
- Kusumawardhani, H. A., Susilowati, I., & Hadiyanto. (2023). Vulnerable yet viable: Stakeholders' role in small-scale fishermen governance towards viable life. *WSEAS Transactions on Environment and Development*, 19, 207–217. <https://doi.org/10.37394/232015.2023.19.18>
- Mubaroq, H., & Jailani, M. (2022). Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan melalui usaha mikro rajungan di Desa Tongas Wetan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh*, 3(1), 154–166. <https://ojs.unimal.ac.id/jspm/article/view/5775>

- Muawanah, U., Huda, H. M., Koeshendrajana, S., Nugroho, D., Anna, Z., Mira, & Ghofar, A. (2017). Keberlanjutan perikanan rajungan Indonesia: Pendekatan model bioekonomi. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 9(2), 71–83. <http://dx.doi.org/10.15578/jkpi.9.2.2017.71-83>
- Nabila, A. N., Taurusman, A. A., Wiryawan, B., & Riyanto, M. (2023). Fishing impact of blue swimming crab (*Portunus pelagicus*) fishery on target in Lamongan Water, Northern Coast of Eastern Java Province. Dalam *IOP conference series: Earth and environmental science* (1137, Artikel 012021). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1137/1/012021>
- Ningrum, V. P., Ghofar, A., & Ain, C. (2015). Beberapa aspek biologi perikanan rajungan (*Portunus pelagigus*) di perairan Betahwalang dan sekitarnya. *Journal of Fisheries Science and Technology (IJFST)*, 11(1), 62–71. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/saintek/article/view/11137/8759>
- Novitasari, N., Kautsari, N., Ahdiansyah, Y., Mardhia, D., Bachri, S., & Nur, M. (2023). Evaluasi ukuran rajungan yang tertangkap di perairan Labuhan Lalar, Sumbawa Barat. *ALBACORE*, 7(1), 197–208. <https://jurnal.ipb.ac.id/index.php/pspalbacore/article/view/46507/25778>
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/189853/permen-kkp-no-17-tahun-2021>
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. (2022) <https://peraturan.bpk.go.id/Details/230457/permen-kkp-no-16-tahun-2022>

- Rees, G. H., & MacDonell, S. G. (2017). Data gathering for actor analyses: A research note on the collection and aggregation of individual respondent data for MACTOR. *Future Studies Research Journal: Trends and Strategies*, 9(1), 115–137. <http://dx.doi.org/10.24023/FutureJournal/2175-5825/2017.v9i1.256>
- Setiyowati, D., & Sulistyawati, D. R. (2019). Analisis stok rajungan (*Portunus pelagicus* Linnaeus, 1758) di pantai utara Jepara, Provinsi Jawa Tengah. *Acta Aquatica: Aquatic Sciences Journal*, 6(2), 46–51. <https://doi.org/10.29103/aa.v6i2.1367>
- Simbolon, D., Nugroho, T., Fajrin, W. A., & Tarigan, D. J. (2020). Penanganan rajungan oleh pelaku rantai pasok, kaitannya dengan penerapan sistem *traceability* dalam perikanan skala kecil di Cirebon, Indonesia. *ALBACORE*, 4(3), 353–370. <https://doi.org/10.29244/core.4.3.353-370>
- Sulamah, M., Suryadi, & Tandos, R. (2016). Pengelolaan program kelompok usaha bersama nelayan bondet zenawi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. *ORASI: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 7(2), 771–785. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/orasi/article/view/1081/771>
- Sunartiningih, A., & Larasati, Z. W. (2020). Inisiatif dari pesisir utara Jawa: Merangkul kearifan lokal dan kerjasama antar aktor berkepentingan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir. *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*, 5(1), 28–39. <https://doi.org/10.25273/gulawentah.v5i1.6617>
- Susanto, A., Irnawati, R., Mustahal, Nurdin, H. S., Marliana, Y., Kurniasih, A., Widowati, N., Murniasih, T. R., & Affandi, N. (2019). Meta analisis pengaruh tekanan penangkapan terhadap ukuran rajungan di Teluk Banten. *Marine Fisheries*, 10(2), 153–163. <https://doi.org/10.29244/jmf.v10i2.29483>
- Susanto, A., Syafrie, H., Nurdin, H. S., Irnawati, R., Supadminingsih, F. N., Hamzah, A., & Kurniawati, V. (2022). Hilangnya alat tangkap pada perikanan rajungan di Teluk Banten: Kasus abandoned, lost or discarded fishing gear. *Marine Fisheries*, 13(2), 233–241. <http://dx.doi.org/10.29244/jmf.v13i2.41961>

- Syatori, A. (2014). Ekologi politik masyarakat pesisir (Analisis sosiologis kehidupan sosial-ekonomi dan keagamaan masyarakat nelayan Desa Citemu Cirebon). *HOLISTIK: Journal for Islamic Social Science*, 15(2), 241–264. <https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/holistik/article/view/330/278>
- Tandio, T., Kusmana, C., Fauzi, A., & Hilmi, E. (2023). Identification of key actors in mangroves plantation using the MACTOR Tool: Study in DKI Jakarta. *Jurnal Sylva Lestari*, 11(1), 163–176. <https://doi.org/10.23960/jsl.v11i1.593>
- Taurusman, A., Wiryawan, B., Besweni, & Isdahartati. (2020). Dampak penangkapan terhadap ekosistem: Landasan pengelolaan perikanan berkelanjutan. *ALBACORE*, 4(1), 109–118. <https://doi.org/10.29244/core.4.1.109-118>
- Tronvoll, B. (2017). The actor: The key determinator in service ecosystems. *Systems*, 5(2), Artikel 38. <https://doi.org/10.3390/systems5020038>
- Wardono, B., Muhartono, R., Hikmayani, Y., Apriliani, T., & Hikmah. (2019). Analisis prospektif peran aktor dalam strategi formulasi pembangunan perikanan di Kabupaten Natuna. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 14(2), 179–195. <https://doi.org/10.15578/jsekp.v14i2.8241>
- Warren, C., & Steenbergen, D. J. (2021). Fisheries decline, local livelihoods and conflicted governance: An Indonesian case. *Ocean and Coastal Management*, 202, Artikel 105498. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2020.105498>
- Wibowo, J. T., Kinseng, R. A., & Sumarti, T. (2016). Dinamika modal sosial nelayan dalam arena ekonomi: Studi kasus nelayan rajungan Desa Betahwalang Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. *Sosiologi Reflektif*, 11(1), 139–154. <http://dx.doi.org/10.14421/jsr.v11i1.1276>
- Wijaya, A. I., Nainggolan, C., & Baskoro, M. (2023). Strategi pengembangan penangkapan rajungan (*Portunus pelagicus*) dengan bubu di Muara Gembong Kabupaten Bekasi. *Buletin*

Jalanidhitah Sarva Jivitam, 5(1), 1–9. <https://doi.org/10.15578/bjsj.v5i1.11392>

Zamroni, A., Koeshendrajana, S., Suryawati, S. H., Sari, Yesi, S., Huda, M. H., Triyanti, R., Wijaya, R. A., Setyawan, E. Y., Nurhendra, & Saputra, J. (2020). *Model sosial ekonomi open-closed season dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan: Rajungan dan benih bening lobster* [Laporan teknis]. Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia.

